

ABSTRAK

Penelitian ini Membahas tentang “Implementasi Perda No 18 tahun 2017 tentang kebersihan, keindahan dan Ketertiban pedagang kaki lima di Kota Garut. Pertumbuhan sektor informal seperti pedagang kaki lima merupakan salah satu bentuk elastisitas masyarakat dalam upaya untuk mendapatkan penghasilan dan menafkahi keluarga. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori implementasi kebijakan yang ini menggunakan teori milik Merilee S. Grindle tentang analisis konten dan konteks implementasi kebijakan publik. Kajian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Implementasi kebijakan pemerintah dalam penataan pedagang kaki lima pada daerah Garut Jl Siliwangi , belum sepenuhnya di implementasikan dengan baik. Meskipun belum maksimal karena variabel yang menjadi tolak ukur variabel yang belum terpenuhi secara maksimal yaitu karakteristik badan pelaksana bahwa ada sikap penolakan dari para Pedagang kaki lima yang tidak mau dilakukannya kebijakan Penataan serta pengelolaan yang telah diatur oleh pemerintah kota Garut , dan tidak berhasilnya suatu kinerja kebijakan dalam melakukan Pengelolaan dan Penataan kepada para Pedagang kaki lima.

Hasil pada penelitian ini adalah perda yang sudah dibuat oleh pemerintah belum terlaksanakan secara efektif, hanya berjalan sekitar 60% karena ada beberapa hambatan dimasyarakat. Dengan menggunakan model implementasi kebijakan seperti yang dikemukakan oleh Grindle, dapat dilihat kedua aspek yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan suatu kebijakan, yakni konten (isi) kebijakan dan kontek (lingkungan) implementasi kebijakan, yang masih belum mendukung selama pelaksanaan penataan PKL yang dijalankan. Pada aspek kontens kebijakan, terlihat isi kebijakan pembinaan PKL yang masih belum memihak pada kepentingan para PKL selaku kelompok sasaran dari kebijakan. Pada kontek lingkungan dalam pelaksanaan pembinaan PKL terkait dengan kekuasaan, kepentingan, dan strategi para aktor, terlihat adanya kekuasaan yang sangat dominan kepada pemerintah.

Kata Kunci : implementasi kebijakan ; penataan ; pedagang kaki lima

ABSTRACT

This study discusses "Implementation of Regional Regulation No. 18 of 2017 concerning cleanliness, beauty and order of street vendors in Garut City. The growth of the informal sector such as street vendors is a form of community elasticity in an effort to earn income and provide for the family. The research method used is a qualitative descriptive research method using policy implementation theory which uses Merilee S. Grindle's theory of content analysis and the context of public policy implementation. This study is a qualitative research using the case study method.

Data collection was carried out using interview techniques, observation and documentation. The implementation of government policies in structuring street vendors in the Garut area, Jl Siliwangi, has not been fully implemented properly. Even though it is not optimal because the variable that is the benchmark for the variable that has not been maximally fulfilled, namely the characteristics of the implementing agency that there is an attitude of rejection from the street vendors who do not want to carry out the Structuring and management policies that have been regulated by the Garut city government, and the failure of a policy performance in managing and managing street vendors.

The conclusion of this study is that the regional regulations that have been made by the government have not been implemented effectively, only running about 60% because there are several obstacles in the community. By using the policy implementation model as proposed by Grindle, it can be seen that two aspects are needed to support the success of a policy, namely the content (content) of the policy and the context (environment) of policy implementation, which are still not supportive during the implementation of the street vendors arrangement. In the aspect of policy content, it can be seen that the contents of the street vendor development policy are still not in favor of the interests of street vendors as the target group of the policy. In the environmental context in the implementation of street vendor development related to the powers, interests, and strategies of the actors, it can be seen that there is a very dominant power to the government.

Keywords: *policy implementation; arrangement; Street vendors*

